

**RINGKASAN**  
**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN**  
**PROFESIONALITAS PELAYANAN PUBLIK**

( The Ethic Code of Civil Servants And Professionalism in Public Service)

Oleh: Herini Siti Aisyah

Fakultas Hukum Unair

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Indonesia?. Apakah dengan adanya Kode Etik PNS dapat meningkatkan Profesionalitas Pelayanan Publik?

Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Bahan hukum yang dipergunakan sebagai acuan adalah bahan hukum primer dan sumber hukum skunder. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Dalam UU No. 8 Tahun 1974 Pasal 28 Kode Etik Pegawai Negeri adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku. Dan perbuatan bagi Pegawai Negeri Sipil maka sanksi terhadap pelanggaran Kode etik adalah sanksi moral.

Dalam pasal 30 UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU No. 8 th. 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan pembinaan korp, kode etik dan peraturan disiplin ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah . Sedangkan kewajiban dan larangan bagi PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah No,30 Tahun 1980 pasal 2 dan 3

Untuk melaksanakan kode etik diperlukan moralitas yang tinggi bagi penyandang profesi tersebut. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional; ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik merupakan ketaatan naluriah yang telah bersatu dengan pikiran, jiwa dan perilaku tenaga profesional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder ditambah data lapangan yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Bahan hukum primer digunakan berupa hukum positif yaitu perturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Bahan skunder meliputi buku literatur dalam bidang Hukum Administrasi maupun bidang lainnya yang berkaitan dengan pokok

masalah penelitian. Bahan skunder lainnya adalah penelitian di lapangan yang menjadi sumber data adalah PNS di Pemkab Sidoarjo.

Dalam penelitian ini disimpulkan : (1) Dalam pelayanan publik salah satu aspek yang menonjol adalah keharusan aparatur mempunyai komitmen yang besar pada nilai dan standar moralitas yang tinggi dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. kode etik PNS diatur dalam UU dan Peraturan Pemerintah tidak bisa optimal untuk mendukung pelayanan publik yang profesional.(2) Perumusan kembali kode etik PNS akan dapat melahirkan kontrol yang menyangkut kepatutan perilaku (*behoorlijkheid*) PNS. Posisi PNS yang netral merupakan embrio menuju profesionalisme birokrasi; PNS sebagai suatu profesi harus memiliki suatu kode etik tertentu yang mengatur tentang apa yang bisa dan yang tidak bisa dilakukan oleh seorang PNS dalam kapasitasnya sebagai sebuah profesi yang rumusannya ditentukan oleh PNS itu sendiri. Selain itu dengan adanya kode etik yang dirumuskan sendiri, PNS akan lebih netral dan berpihak pada kepentingan publik. Selain dengan adanya Kode Etik yang dirumuskan sendiri diharapkan PNS dapat terlindungi dari tekanan-tekanan baik internal maupun eksternal (misalnya tekanan politik )

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dalam penelitian ini disarankan: (1) Agar pelayanan publik lebih professional maka diperlukan adanya kebijakan untuk dapat mengembangkan Kode Etik PNS yang mudah untuk dijadikan acuan perilaku dalam memberikan pelayanan public. (2) Untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin profesional maka perlu dikaji lebih lanjut masalah-masalah yang mengatur PNS berupa Kode Etik PNS dalam memberikan Pelayanan Publik; agar dapat mendorong setiap PNS untuk lebih netral dan mengutamakan kepentingan public atau masyarakat.

*Kata kunci = Pegawai negeri sipil ; kode etik ; pelayanan publik*

-----  
 Dibiayai Oleh : DIPA PNBPN UNAIR  
 Nomor SK Rektor : 4683/JO3.2/PG/2005  
 Tanggal : 4 Juli 2005

SUMMARY  
THE ETHIC CODE OF CIVIL SERVANTS AND PROFESSIONALISM IN  
PUBLIC SERVICE

Oleh: Herini Siti Aisyah  
Fakultas Hukum Unair

The problem proposed in this research is: How is the regulation of the Ethic Code of Civil Servants in Indonesia? Can the existence of the Ethic Code improve the professionalism of public service?

It is a normative, legal research. The legal materials used as the references were the primary legal materials and the secondary legal sources. All the legal materials were analyzed qualitatively and were presented descriptively.

Act No. 8 the year of 1974 Article 28 the Ethic Code of Civil Servants is the guidance of attitude, behavior and practices which must be performed by every civil servant. The Ethic Code is the guidance of attitude and behavior for the civil servants. Such violation to the Ethic Code will result in moral sanction.

Article 30 Act No. 43 the year of 1999 about the Change of Act No. 8 the year of 1974 about the Principles of officialdom states that the construction of the corps, ethic code and regulations of discipline must be determined by the Government Regulations while the responsibility and the prohibition for the civil servants are regulated in the Government Regulation No. 30 the year of 1980 articles 2 and 3.

Performing the ethic code needs high morality for the person holding the profession. The existence of the Ethic Code gives a protection to stay away from such unprofessional behavior; the obedience of professional employees towards the Ethic Code is a kind of a natural obedience which has been united in the mind, soul and behavior of the professional employees.

This research is a normative, legal research. The legal materials for this research consist of primary legal materials, secondary legal sources and field related data. The primary legal materials used include positive laws which are in the form of regulations related with public service. The secondary materials covers reference books in the filed